

# ANALISIS PERBANDINGAN LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA DALAM LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA SEBELUM KRISIS DAN PADA PERIODE KRISIS

1

Pramudoyo Anton Yularto - BPKP Jawa Tengah  
Anis Chariri - Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

## ABSTRACT

*This research is intended to analyze some factors which influences the extent of voluntary disclosure in annual report of State-Owned Companies (BUMN) and non-BUMN companies before and during monetary crisis. It also investigates whether there is differences in the extent of voluntary disclosure in the period of before monetary crisis and during monetary crisis.*

*Regression model was used to test whether leverage ratio, liquidity ratio, percentage of public shareholder, public accountant reputation, company life, firm's status and asset influenced the extent of voluntary disclosure in annual report. Sign test was employed to test the differences in the extent of voluntary disclosure during monetary crisis and during monetary crisis (1996 with 1998). Two hundred and eighty five companies which are listed in BEJ in 1996-1998 were chosen as a sample for this research.*

*The result of 3 years in a row research consistently showed that variable status of BUMN company and the amount of company assets influenced the extent of voluntary disclosure whereas variable of leverage ratio and liquidity ratio did not influence. The variable of company life and public accountant reputation only influenced in 1996 and the percentage of public shareholder only influenced in 1998 eventhought with negative direction. This research also shown that there was no differences in the extent of voluntary disclosure level before and during the monetary crisis.*

**Keywords :** *company factors, voluntary disclosure, annual report, before and during the monetary crisis.*

## PENDAHULUAN

Perusahaan yang telah memperoleh dana dari masyarakat dengan menjual saham di Pasar Modal, oleh Badan Pengawas Pasar Modal ( Bapepam ) diwajibkan untuk membuat Laporan Tahunan, yang disajikan setransparan mungkin yaitu apa adanya, tidak dibuat-buat, jujur, netral dan objektif. Informasi yang dimuat dalam Laporan Tahunan ada dua jenis. Yang pertama adalah laporan tahunan dengan pengungkapan wajib yaitu pengungkapan informasi yang wajib diberitahukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bapepam nomor:Kep-38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996. Jenis yang kedua adalah laporan tahunan dengan pengungkapan sukarela yaitu pengungkapan informasi di luar pengungkapan wajib

yang diberikan dengan sukarela oleh perusahaan kepada para pemakai. Misalnya informasi tentang proyeksi jumlah penjualan, proyeksi laba, proyeksi aliran kas tahun berikutnya dan sebagainya.

Selama ini, kebijakan luas pengungkapan sukarela dapat berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang. Perbedaan luas pengungkapan sukarela tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan seperti: budaya perusahaan, bidang usaha, proses produksi, pasar, sumber daya dan sebagainya. Menurut Lang dan Lundholm (1993) dilihat dari aspek laporan keuangan karakteristik perusahaan ditentukan berdasarkan 3 pendekatan yaitu: karakteristik yang berkaitan dengan struktur, kinerja (*performance*), dan pasar (*market*).

Struktur meliputi ukuran (*size*) perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya/*leverage*. Kinerja (*performance*) meliputi likuiditas perusahaan dan laba (*profit*). Sedangkan dari pendekatan pasar meliputi faktor-faktor kualitatif seperti tipe industri, tipe auditor dan status perusahaan. Menurut Zarzeski (1996) pendekatan pasar dapat juga dilihat secara kuantitatif yang meliputi jumlah penjualan ekspor, *size* perusahaan (total aktiva) dan total kewajiban. Termasuk juga di dalamnya proporsi pemegang saham dan umur perusahaan.

Ada beberapa variabel yang secara teoritik dan empirik dapat menunjukkan dan menjelaskan variasi luas pengungkapan dalam laporan tahunan. Variabel yang mempengaruhi variasi pengungkapan sukarela, antara lain *Leverage/Solvabilitas* yang diukur dengan *Debt-Equity Ratio (DER)* atau rata-rata *DER* (Edi Subiyantoro, 1996; Ainun Na'im dan Fu'ad Rakhman, 2000; dan Yuniati Gunawan, 2000), *Likuiditas* yang diukur dengan *Current Ratio* atau rata-rata *current ratio* (Singhvi dan Desai, 1971; Wallace *et.al.*, 1994; dan Edi Subiyantoro, 1996), *Struktur Kepemilikan Saham* yang diukur dengan prosentase kepemilikan publik, kepemilikan asing, atau jumlah pemegang saham (Singhvi dan Desai, 1971; Ainun Na'im dan Fu'ad Rakhman, 2000), *Reputasi KAP* yang diukur dengan *size* kantor akuntan, *market share* atau kategori kantor akuntan (Singhvi dan Desai, 1971; dan Fitriani, 2001), *Umur Perusahaan* yang diukur dengan lamanya perusahaan berdiri, atau waktu *listing* di pasar modal (Singhvi dan Desai, 1971; Djoko Susanto, 1992; dan Wallace *et.al.*, 1994), *Status/Basis Perusahaan* yang diukur dengan kategori *BUMN-Non BUMN*, atau *PMDN-PMA* (Djoko Susanto, 1992; Fitriani, 2001), *Penerbitan Sekuritas* (Bambang Suropto, 1998), *Ukuran Perusahaan/Size* yang diukur dengan jumlah aktiva, penjualan, atau kapitalisasi pasar (Buzby, 1975; Tong, Kidman dan Wah, 1990; Djoko Susanto, 1992; Wallace *et.al.*, 1994; Edi Subiyantoro, 1996; Bambang Suropto, 1998; Yuniati Gunawan, 2000; Fitriani, 2001; dan Marwata, 2001), dan *Profitabilitas* (Fitriani, 2001).

Namun demikian, dari beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa beberapa variabel ternyata tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Variabel tersebut antara lain *Umur Perusahaan* (Bambang Suropto, 1998; dan Marwata, 2001), *Status Listing* (Buzby, 1975), *Tipe Auditor* (Tong, Kidman dan Wah, 1990; Djoko Susanto, 1992; dan Wallace *et.al.*, 1994), *Profitabilitas* (Djoko Susanto, 1992; Wallace *et.al.*, 1994; dan Edi Subiyantoro, 1996), *Jenis Industri* (Wallace *et.al.*, 1994; Edi Subiyantoro, 1996; Bambang Suropto, 1998; dan Yuniati Gunawan, 2000), *Likuiditas* (Bambang Suropto, 1998; Yuniati Gunawan, 2000; dan Marwata, 2001), *Basis Perusahaan* (Bambang Suropto, 1998; dan Marwata, 2001), *Struktur kepemilikan* (Djoko Susanto, 1992), dan *Leverage/Solvabilitas* (Wallace *et.al.*, 1994; Bambang Suropto, 1998; dan Marwata, 2001). Beberapa pertentangan hasil penelitian tersebut, khususnya di Indonesia dapat terjadi karena beberapa alasan salah satunya adalah kemungkinan perbedaan periode yang dipakai yaitu sebelum dan selama krisis ekonomi terjadi.

Ketika krisis moneter terjadi di Indonesia mulai pertengahan tahun 1997 mengakibatkan suku bunga pinjaman berkisar sekitar 60 persen dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap valuta asing



terutama dollar Amerika sekitar 300 persen. Dalam situasi krisis seperti itu banyak perusahaan mengurangi produksi atau berhenti total. Akibat lebih jauh volume dan nilai penjualan turun, kredit macet, jumlah karyawan berkurang dan sebagainya. Di lain pihak krisis tersebut memberikan keberuntungan bagi perusahaan berorientasi ekspor dengan kandungan produk berbahan baku lokal seperti perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan hasil hutan. Dalam situasi krisis perusahaan eksportir tersebut dapat meningkatkan volume dan nilai penjualan. Krisis moneter yang berkepanjangan dengan akibat merugikan atau menguntungkan bagi perusahaan diperkirakan akan memberikan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan sebelum terjadinya krisis tersebut.

Atas dasar pertentangan hasil penelitian di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis apakah rasio *leverage*, rasio likuiditas, persentase jumlah pemegang saham publik, reputasi kantor akuntan publik, umur perusahaan dan besarnya *asset* perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menganalisis apakah ada perbedaan tingkat luas pengungkapan sukarela sebelum dan pada saat krisis moneter (tahun 1996 dengan 1998.).

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Konsep Pengungkapan

Penyampaian informasi (pengungkapan) selain disampaikan melalui laporan keuangan dapat juga disampaikan melalui media lain dalam berbagai bentuk baik yang finansial maupun non finansial. Informasi yang bersifat finansial dapat mengambil bentuk laporan tahunan, prospektus, laporan analisis dan sejenisnya sedangkan yang bersifat non finansial antara lain jumpa pers tentang produk baru, rencana perluasan, rencana peningkatan kesejahteraan karyawan dan sebagainya (FASB, SFAC No.5, 1984, par 7).

Sebagaimana diuraikan dalam bagian awal penelitian ini jenis pengungkapan ada 2 yaitu: pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib yaitu pengungkapan yang diwajibkan menurut peraturan yang berlaku. Pengungkapan sukarela yaitu penyampaian informasi yang diberikan dengan sukarela oleh perusahaan di luar pengungkapan wajib. Berdasarkan sistem pengungkapan keuangan yang dinyatakan dalam SFAC 1, pengungkapan sukarela oleh perusahaan kemungkinan akan dimasukkan dalam media pelaporan keuangan lain atau dalam media informasi lain-lain.

Pengungkapan sukarela merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan dan untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis perusahaan (Healy dan Palepu, 1993 dalam Wallace et.al 1994). Standar-standar akuntansi biasanya menghendaki pengungkapan yang minimum, tetapi tidak menghalangi manajemen untuk memberikan tambahan pengungkapan dengan sukarela. Pengungkapan-pengungkapan ini meliputi gambaran strategi perusahaan dalam jangka panjang, indikator-indikator non keuangan penting, yang bermanfaat untuk keefektifitasan implementasi strategi perusahaan dan berguna dalam membahas hubungan antara indikator-indikator penting tersebut dengan laba yang akan datang (*future profit*), (Healy dan Palepu, 1993 dalam Wallace et.al 1994 ).

Studi-studi yang pernah dilakukan menyatakan bahwa pengungkapan sukarela akan lebih banyak dilakukan apabila kualitas informasi yang dimiliki oleh manajer relatif tinggi dan atau ketika ketidaksimetrisan informasi relatif besar ( Penno 1997 dalam Ainun Naim dan Fu'ad Rakhman, 2000).

Sedangkan Watts, 1977 (dalam King dan Wallin, 1991), menyatakan bahwa pengungkapan sukarela akan timbul/terjadi karena ada tekanan pasar dan ancaman intervensi yang berkaitan dengan peraturan. Dengan melakukan pengungkapan sukarela kepada publik sesungguhnya akan membatasi pertanyaan-pertanyaan investor dan mereka tidak akan melakukan dialog sendiri (*private dialogue*) untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya.

### Hubungan Antara Rasio *Leverage* Dengan Pengungkapan Sukarela

Perusahaan yang memiliki proporsi utang lebih besar dalam struktur permodalannya akan mempunyai biaya keagenan yang lebih besar. Semakin besar *leverage* perusahaan, semakin besar kemungkinan transfer kemakmuran kepada pemegang saham dan manajer (Meek *et al.*, 1995). Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi mempunyai kewajiban lebih untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang (Wallace *et al.*, 1994; Edi Subiyantoro, 1996; Ainun Na'im dan Fu'ad Rakhman, 2000; dan Yuniati Gunawan, 2000).

### Hubungan Antara Rasio Likuiditas Dengan Pengungkapan Sukarela

Likuiditas dapat dipakai sebagai ukuran kesehatan suatu perusahaan. Tingkat kesehatan dipandang dapat mempengaruhi luas pengungkapan sukarela. Hal itu didasarkan pada ekspektasi bahwa perusahaan yang secara keuangan sehat, kemungkinan akan lebih banyak mengungkapkan informasi dibanding dengan perusahaan yang tidak sehat (lemah). Hasil penelitian Belkaoui dan Kahl, 1978 dalam Wallace *et al.*, 1994; Cooke, 1989a, 1989b menunjukkan bahwa kesehatan perusahaan yang ditunjukkan dalam rasio likuiditas yang tinggi diharapkan berhubungan dengan pengungkapan yang lebih luas. Sebaliknya, apabila likuiditas dipandang oleh pasar sebagai ukuran kinerja, maka perusahaan yang memiliki rasio likuiditas rendah perlu mengungkapkan informasi yang lebih rinci untuk menjelaskan lemahnya kinerja dibanding dengan perusahaan yang memiliki rasio likuiditas yang tinggi (Singhvi dan Desai, 1971; Wallace *et al.*, 1994; dan Edi Subiyantoro, 1996).

### Hubungan Antara Pemilikan Saham Masyarakat Dengan Pengungkapan Sukarela

Alasan yang dapat dikemukakan bahwa semakin besar jumlah saham yang dimiliki masyarakat akan semakin besar informasi yang dapat diungkapkan adalah tuntutan dari publik (masyarakat) terhadap transparansi perusahaan seluas-luasnya. Dengan demikian pengertian publik disini adalah pihak individu yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengannya. Sedangkan perusahaan perseroan (PT) yang memiliki saham tidak dimasukkan dalam kategori publik. Hal ini dikarenakan ada kemungkinan pemilik PT tersebut adalah pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan manajemen perusahaan (Singhvi dan Desai, 1971; Ainun Na'im dan Fu'ad Rakhman, 2000).

### Hubungan Antara Reputasi Kantor Akuntan Publik Dengan Pengungkapan Sukarela

Alasan yang mendasari bahwa profesi Akuntan dapat mengungkapkan informasi yang lebih luas adalah akuntan publik merupakan profesi kepercayaan. Oleh karena itu, akuntan juga dituntut untuk menunjukkan sikap profesionalnya dalam mengungkapkan informasi seluas mungkin kepada masyarakat. Dengan demikian KAP yang memiliki reputasi tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas pengauditan yang tinggi pula. Penunjukkan KAP yang berkualitas akan



diinterpretasikan oleh publik bahwa perusahaan memiliki informasi yang tidak menyesatkan dan telah mengungkapkan informasi setransparan mungkin (Singhvi dan Desai, 1971; Daljono 2000, dan Fitriani, 2001). Ukuran reputasi kantor akuntan publik dalam penelitian ini adalah berdasarkan ranking. Penentuan KAP yang memiliki reputasi dilakukan dengan perankingannya Rina Trisnawati (1999) yaitu berdasarkan jumlah klien maupun berdasarkan jumlah aset klien. Berdasarkan perankingan tersebut KAP yang masuk 3 besar adalah Prasetyo Utomo, Hans Tuanakotta dan Mustofa, dan Hanadi Sujendra.

### **Hubungan Antara Umur Perusahaan Dengan Pengungkapan Sukarela**

Umur perusahaan menunjukkan perusahaan tetap eksis (*survive*), mampu bersaing, dan memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Semakin panjang (besar) umur perusahaan akan memberikan pengungkapan lebih luas dibandingkan perusahaan lain yang umurnya lebih pendek dengan alasan perusahaan tersebut memiliki pengalaman lebih dalam pengungkapan laporan tahunan (Singhvi dan Desai, 1971; Djoko Susanto, 1992; Wallace et.al., 1994).

### **Hubungan Antara Status Perusahaan Dengan Pengungkapan Sukarela**

Alasan yang mendasari bahwa status perusahaan BUMN lebih luas dalam memberikan pengungkapan sukarela dibandingkan non BUMN adalah perusahaan BUMN adalah milik negara (rakyat). Dalam melakukan aktivitasnya perusahaan BUMN tidak terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan representasi dari masyarakat. Dengan demikian ada tekanan politis agar perusahaan BUMN memberikan pengungkapan yang lebih luas. Status/Basis Perusahaan yang diukur dengan kategori BUMN-Non BUMN, atau PMDN-PMA terbukti berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela (Djoko Susanto, 1992; dan Fitriani, 2001).

### **Hubungan Antara Aset Perusahaan Dengan Pengungkapan Sukarela**

Alasan yang mendasari bahwa semakin besar aset perusahaan akan semakin luas dalam memberikan pengungkapan sukarela adalah perusahaan dengan aset besar mungkin memiliki biaya pengungkapan yang lebih kecil atau memiliki biaya *competitive disadvantage* kecil. Selain itu perusahaan besar mungkin kegiatannya lebih kompleks, lebih luas dalam jaringan operasi (distribusi) ke berbagai daerah (negara) dibandingkan dengan perusahaan kecil (Cooke, 1989). Beberapa penelitian juga mendukung logika hubungan ini (Buzby, 1975; Tong, Kidman dan Wah, 1990; Djoko Susanto, 1992; Wallace et.al., 1994; Edi Subiyantoro, 1996; Bambang Suropto, 1998; Yuniati Gunawan, 2000; Fitriani, 2001; dan Marwata, 2001).

Sementara itu, jika dikaitkan dengan kondisi perekonomian yang berbeda, ada kemungkinan perbedaan luas pengungkapan sukarela. Dalam situasi krisis, banyak perusahaan mengurangi produksi atau berhenti total. Akibat lebih jauh volume dan nilai penjualan turun, kredit macet, jumlah karyawan berkurang dan sebagainya. Di lain pihak krisis tersebut memberikan keberuntungan bagi perusahaan berorientasi ekspor dengan kandungan produk berbahan baku lokal seperti perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan hasil hutan. Dalam situasi krisis perusahaan eksportir tersebut dapat meningkatkan volume dan nilai penjualan. Krisis moneter yang berkepanjangan dengan akibat merugikan atau menguntungkan bagi perusahaan diperkirakan akan memberikan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan sebelum terjadinya krisis tersebut.

Atas dasar logika hubungan tersebut, hipotesis penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

- H1<sub>1</sub>: Rasio leverage, rasio likuiditas, persentase jumlah pemegang saham publik, reputasi kantor akuntan publik, umur perusahaan, status perusahaan dan besarnya asset perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan.
- H1<sub>2</sub>: Rasio leverage berpengaruh secara positif terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan.
- H1<sub>3</sub>: Rasio likuiditas berpengaruh secara positif terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan.
- H1<sub>4</sub>: Persentase jumlah pemegang saham masyarakat (publik) berpengaruh secara positif terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan.
- H1<sub>5</sub>: Reputasi kantor akuntan publik berpengaruh secara positif terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan.
- H1<sub>6</sub>: Umur perusahaan berpengaruh secara positif terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan.
- H1<sub>7</sub>: Status perusahaan BUMN berpengaruh secara positif terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan.
- H1<sub>8</sub>: Besarnya asset perusahaan berpengaruh secara positif terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan.
- H1<sub>9</sub>: Tingkat luas pengungkapan sukarela sebelum dan pada saat krisis moneter berbeda.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Data, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa laporan tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan publik yang sahamnya terdaftar di BEJ pada tahun 1996 – 1998. Laporan tahunan tersebut diperoleh melalui Pusat Referensi Pasar Modal Bursa Efek Jakarta. Sedangkan data persentase jumlah pemegang saham publik dan tanggal penerbitan saham perdana (*first issue*) diperoleh melalui *Indonesian Capital Market Directory* tahun 1997, 1998 dan 1999.

### Populasi dan Prosedur Pemilihan Sampel

Populasi penelitian meliputi seluruh perusahaan yang terdaftar di BEJ pada tahun 1996 – 1998. Pemilihan periode tersebut disesuaikan dengan salah satu tujuan penelitian yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.

Agar variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini terwakili maka sampel dipilih dengan metode Pemilihan Sampel Secara Acak Berdasarkan Strata Yang tidak Proporsional (*Non Proportioned Stratified Random Sampling*). Pemilihan non proporsional dikarenakan jika dilakukan secara proporsional ada kemungkinan jumlah subjek pada strata tertentu terlalu kecil dan pada strata yang lain terlalu besar (Nur Indriantoro, Bambang Supomo, 1999). Selain itu juga dikarenakan ada perbedaan yang cukup besar antara jumlah perusahaan BUMN dengan Non BUMN.



Penentuan strata dilakukan berdasarkan bidang usaha non keuangan, seperti yang dimuat dalam harian Bisnis Indonesia. Bidang usaha tersebut meliputi: (1) pertanian, (2) pertambangan, (3) industri dasar dan kimia, (4) aneka industri, (5) industri barang konsumsi, (6) properti dan real estate, (7) infrastruktur, utilitas dan transportasi, (8) perdagangan, jasa dan investasi. Penentuan strata hanya meliputi bidang usaha non keuangan dikarenakan memiliki karakteristik yang berbeda dengan bidang usaha keuangan, misalnya *annual sales* (Edi Subiyantoro, 1996).

Berdasarkan tingkat keyakinan 95 %, estimasi interval 2,08 dan standar deviasi penelitian sebelumnya 10,2 (Djoko Susanto, 1992) maka jumlah sampel ditentukan sebanyak 95 buah perusahaan untuk setiap tahun.

## Definisi Operasional Variabel

### Variabel dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah indek pengungkapan. Variabel ini mengukur luas pengungkapan sukarela berdasarkan jumlah item pengungkapan sukarela yang diungkap dalam laporan tahunan perusahaan sampel. Semakin banyak item pengungkapan sukarela yang dimuat dalam laporan tahunan berarti semakin besar indek luas pengungkapan sukarela perusahaan.

Daftar item pengungkapan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian Bambang Surtpto (1998), Botosan (1997), item pengungkapan wajib dalam laporan tahunan berdasarkan peraturan Bapepam (Kep-38/PM/1996), dan kuesioner Badan Pusat Statistik serta informasi yang harus dimuat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Berdasarkan hal di atas diperoleh 43 item informasi pengungkapan sukarela.

Indek pengungkapan yang akan digunakan untuk mengukur tingkat keluasaan pengungkapan sukarela diperoleh dengan cara sebagai berikut (Cooke, 1993, Bambang Surtpto, 1998):

1. Apabila setiap item informasi diungkapkan dalam laporan tahunan diberi nilai satu dan nol apabila tidak diungkapkan.
2. Menggunakan model pengungkapan yang tidak diberi bobot sehingga memperlakukan item pengungkapan secara sama artinya tidak membedakan relatif pentingnya item informasi tersebut dalam pengambilan keputusan.
3. Mengukur luas pengungkapan dengan indek yaitu membandingkan total skor yang diperoleh dengan skor yang diharapkan diperoleh oleh perusahaan.

### Variabel Independen

Variabel independen yang akan diuji dalam penelitian ini dalam hubungannya dengan pengaruh yang diberikan terhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan publik meliputi variabel-variabel:

1. Variabel rasio *leverage*, diukur berdasarkan perbandingan hutang dengan total aktiva.
2. Variabel rasio likuiditas, diukur berdasarkan perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar.
3. Variabel persentase pemilikan saham oleh masyarakat, diukur berdasarkan perbandingan jumlah saham yang dimiliki masyarakat dengan total jumlah saham yang beredar per tanggal 31 Desember 1996, 1997, 1998.

4. Variabel reputasi kantor akuntan publik ditunjukkan dengan dummy, nilai ( 1 ) untuk KAP yang memiliki reputasi dan ( 0 ) untuk yang tidak.
5. Variabel umur perusahaan, diukur sesuai dengan jumlah umur perusahaan sejak penawaran saham perdana ( *first issue* ).
6. Variabel status perusahaan ditunjukkan dengan dummy, nilai (1) untuk BUMN dan (0) untuk non BUMN.
7. Variabel besarnya asset perusahaan, diukur dengan total asset perusahaan per tanggal 31 Desember 1996, 1997, 1998.

## Teknik Analisis Data

### Model Regresi

Penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaannya adalah :

$$\text{INDEK} = \beta_0 + \beta_1 \text{LVR} + \beta_2 \text{LKD} + \beta_3 \text{PBLK} + \beta_4 \text{KAP} + \beta_5 \text{UMUR} + \beta_6 \text{STATUS} + \beta_7 \text{ASSET} + e$$

#### Keterangan :

INDEK	= indeks skor pengungkapan
LVR	= rasio <i>leverage</i>
LKD	= rasio likuiditas
PUBLIK	= persentase pemilikan saham oleh masyarakat
KAP	= dummy KAP bereputasi dan tidak bereputasi
UMUR	= besarnya umur perusahaan
STATUS	= dummy Status BUMN dan non BUMN
ASSET	= besarnya asset perusahaan
$\beta$	= konstanta
e	= error

Agar model analisis yang dipakai dalam penelitian ini secara teoritis menghasilkan nilai parameter model penduga yang sah terlebih dahulu akan dilakukan pengujian asumsi klasik regresi yang meliputi uji normalitas, autokorelasi dan multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

### Pengujian Hipotesis

Setiap hipotesa variabel independen akan diterima atau ditolak ditentukan dari tanda positif/negatif dan signifikansi koefisien regresinya, setelah dilakukan pengujian terhadap model regresi. Untuk menguji signifikansi model digunakan alat uji ANOVA ( F-test ) dan untuk menguji signifikansi koefisien regresi digunakan alat uji t-test. Sedang perbedaan luas pengungkapan diuji dengan Sign Test.



## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### Gambaran Umum Obyek Penelitian

Jumlah perusahaan yang go publik di bursa efek Jakarta per 31 Desember 1996, 1997 dan 1998 adalah sebesar 253, 282 dan 287. Proporsi jumlah perusahaan sampel untuk tahun 1996 sebesar 37,55 %, 33,69 % untuk tahun 1997 dan 33,10 % untuk tahun 1998. Dua ratus delapan puluh lima laporan tahunan perusahaan sampel yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 1996 – 1998 dipilih menjadi objek penelitian. Pemilihan perusahaan sampel berdasarkan pengelompokan bidang usaha yang dimuat di Harian Bisnis Indonesia. Perincian jumlah dapat dilihat pada Tabel 1.

**TABEL 1**  
**BIDANG USAHA PERUSAHAAN SAMPEL**

No.	Bidang	Tahun	Tahun	Tahun
		1996	1997	1998
1.	Aneka Industri	21	19	16
2.	Industri Barang Konsumsi	22	19	19
3.	Industri Dasar Dan Kimia	24	21	22
4.	Infrastruktur, Utilitas, Transportasi	7	5	6
5.	Perdagangan, Jasa, Investasi	15	15	19
6.	Pertambangan	2	4	3
7.	Pertanian	1	4	2
8.	Properti Dan Real Estate	3	8	8
	Jumlah	95	95	95

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan 1996-1998

### Deskripsi Variabel

Variabel independen pertama yang akan diuji adalah rasio *leverage*. Dua puluh empat perusahaan yang memiliki rasio *leverage* di bawah 0,26 pada tahun 1996-1998 memberikan nilai rata-rata indeks pengungkapan sebesar 0,47 (1996), 0,50 (1997) dan 0,48 (1998). Jumlah perusahaan yang memiliki rasio 0,26 – 0,50 sebanyak 65 buah dari tahun 1996-1998 dengan nilai rata-rata indeks pengungkapan 0,50 (1996, 1997) dan 0,46 (1998). Sedangkan yang memiliki rasio 0,51 – 0,75 ada 127 buah perusahaan dari tahun 1996-1998 dengan nilai rata-rata indeks pengungkapan 0,50. Perusahaan yang memiliki rasio di atas 0,75 ada 69 buah dengan nilai rata-rata indeks pengungkapan sebesar 0,50 (1996), 0,52 (1997) dan 0,49 (1998). Distribusi frekuensi rasio *leverage* dari perusahaan sampel dan indeks pengungkapan disajikan dalam Tabel 2.

Variabel independen kedua yang akan diuji dalam penelitian ini adalah rasio likuiditas. Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas di bawah 1,00 menghasilkan nilai rata-rata indeks pengungkapan sebesar

0,51 (1996) dan 0,48 (1997,1998). Perusahaan yang memiliki rasio 1,00 – 1,99 menghasilkan nilai rata-rata indeks pengungkapannya sebesar 0,50 (1996), 0,53 (1997) dan 0,49 (1998). Perusahaan yang memiliki rasio 2,00 – 2,99 menghasilkan nilai rata-rata indeks pengungkapan sebesar 0,51 (1996,1997) dan 0,45 (1998), sedangkan yang memiliki rasio di atas 2,99 menghasilkan nilai rata-rata indeks pengungkapan sebesar 0,48 (1996) dan 0,47 (1997) serta 0,42 (1998). Distribusi frekuensi berdasarkan rasio likuiditas dapat dilihat pada Tabel 3.

**TABEL 2**  
**DISTRIBUSI FREKUENSI BERDASARKAN RASIO LEVERAGE**

Ratio <i>Leverage</i>	Tahun 1996				Tahun 1997				Tahun 1998			
	Jml	Min IP	Max IP	Rata-rata IP	Jml	Min IP	Max IP	Rata-rata IP	Jml	Min IP	Max IP	Rata-rata IP
0,00 - 0,25	8	0,27	0,67	0,47	7	0,30	0,65	0,50	9	0,28	0,70	0,48
0,26 - 0,50	34	0,26	0,67	0,50	19	0,33	0,81	0,50	12	0,30	0,65	0,46
0,51 - 0,75	47	0,26	0,65	0,50	46	0,33	0,81	0,50	34	0,35	0,74	0,50
≥ 0,76	6	0,33	0,70	0,50	23	0,23	0,72	0,52	40	0,28	0,67	0,49
Jumlah	95	0,26	0,70	0,50	95	0,23	0,81	0,50	95	0,28	0,74	0,49

\*) IP = Indeks Pengungkapan

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan 1996-1998

**TABEL 3**  
**DISTRIBUSI FREKUENSI BERDASARKAN RASIO LIKUIDITAS**

Ratio <i>Likuiditas</i>	Tahun 1996				Tahun 1997				Tahun 1998			
	Jml	Min IP	Max IP	Rata-rata IP	Jml	Min IP	Max IP	Rata-rata IP	Jml	Min IP	Max IP	Rata-rata IP
0,00 - 0,99	10	0,33	0,60	0,51	34	0,23	0,81	0,48	56	0,33	0,70	0,48
1,00 - 1,99	51	0,26	0,67	0,50	43	0,33	0,81	0,53	21	0,28	0,74	0,49
2,00 - 2,99	18	0,35	0,63	0,51	9	0,37	0,67	0,51	11	0,44	0,70	0,45
≥ 3,00	16	0,26	0,70	0,48	9	0,35	0,65	0,47	7	0,30	0,49	0,42
Jumlah	95	0,26	0,70	0,50	95	0,23	0,81	0,50	95	0,28	0,74	0,49

\*) IP = Indeks Pengungkapan

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan 1996-1998



Variabel independen ketiga yang akan diuji adalah persentase pemegang saham publik. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh masyarakat (publik) sampai dengan 10 % memberikan nilai rata-rata indeks pengungkapan sebesar 0,41 (1996,1997) dan 0,50 (1998). Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh publik sebesar 11 % - 20 % menghasilkan nilai rata-rata indeks pengungkapan 0,53 (1996) ; 0,50 (1997) dan 0,52 (1998).

Untuk perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh publik sebesar 21 % - 30 % memberikan nilai rata-rata indeks pengungkapan 0,47 (1996,1998) dan 0,51 (1997). Sedangkan saham perusahaan yang dimiliki oleh publik sebesar 31 % - 40 % menghasilkan nilai rata-rata indeks pengungkapan 0,51 (1996) dan 0,53 (1997,1998). Saham perusahaan yang dimiliki publik sebesar 41 % - 50 % memberikan nilai rata-rata indeks pengungkapan sebesar 0,50 (1996,1997) dan 0,47 (1998). Saham perusahaan yang dimiliki oleh publik di atas 50 % menghasilkan nilai rata-rata indeks pengungkapan 0,51 (1996); 0,50 (1997) dan 0,42 (1998). Distribusi frekuensi persentase pemegang saham publik dapat dilihat pada Tabel 4.

**TABEL 4**  
**DISTRIBUSI FREKUENSI BERDASARKAN PERSENTASE PEMILIKAN PUBLIK**

Persentase Publik	Tahun 1996				Tahun 1997				Tahun 1998			
	Jml	Min IP	Max IP	Rata-rata IP	Jml	Min IP	Max IP	Rata-rata IP	Jml	Min IP	Max IP	Rata-rata IP
0 - 10	2	0,26	0,56	0,41	4	0,30	0,53	0,41	10	0,44	0,60	0,50
11 - 20	27	0,37	0,67	0,53	21	0,35	0,74	0,50	18	0,35	0,67	0,52
21 - 30	29	0,26	0,63	0,47	35	0,30	0,72	0,51	32	0,28	0,70	0,47
31 - 40	18	0,37	0,70	0,51	23	0,23	0,81	0,53	19	0,28	0,74	0,53
41- 50	11	0,30	0,60	0,50	8	0,33	0,58	0,50	9	0,33	0,67	0,47
≥ 51	8	0,27	0,65	0,51	4	0,44	0,56	0,50	7	0,35	0,53	0,42
Jumlah	95	0,26	0,70	0,50	95	0,23	0,81	0,50	95	0,28	0,74	0,49

\* ) IP = Indeks Pengungkapan

Sumber: Indonesian Capital Market Directory 1997,1998,1999

Variabel independen keempat yang akan diuji dalam penelitian ini adalah reputasi kantor akuntan publik. Jumlah perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi sebesar 77 perusahaan (1996), 82 perusahaan (1997) dan 80 perusahaan (1998). Sedangkan yang diperiksa oleh KAP non reputasi sebesar 18 perusahaan (1996), 13 perusahaan (1997) dan 15 perusahaan (1998). Distribusi frekuensi berdasarkan reputasi kantor akuntan publik disajikan dalam Tabel 5.

**TABEL 5**  
**DISTRIBUSI FREKUENSI BERDASARKAN REPUTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

Kelompok KAP	Tahun 1996				Tahun 1997				Tahun 1998			
	Jml	Min IP	Max IP	Rata-rata IP	Jml	Min IP	Max IP	Rata-rata IP	Jml	Min IP	Max IP	Rata-rata IP
Reputasi	77	0,26	0,70	0,51	82	0,23	0,81	0,50	80	0,28	0,74	0,50
Non Reputasi	18	0,26	0,67	0,46	13	0,42	0,81	0,52	15	0,30	0,70	0,46
Jumlah	95	0,26	0,70	0,50	95	0,23	0,81	0,50	95	0,28	0,74	0,49

\*) IP = Indeks Pengungkapan

Sumber: Ditolah dari Laporan Tahunan 1996-1998

Variabel independen kelima yang akan diuji dalam penelitian ini adalah umur perusahaan. Perusahaan yang berumur 0,00 – 3,00 tahun menghasilkan nilai rata-rata indeks pengungkapan sebesar 0,50 (1996); 0,51 (1997) dan 0,47 (1998). Perusahaan yang berumur 3,01 – 5,00 tahun memberikan nilai indeks pengungkapan sebesar 0,48 (1996); 0,51 (1997) dan 0,55 (1998). Sedangkan yang berumur 5,01 – 10,00 tahun menghasilkan nilai rata-rata indeks pengungkapan 0,49 (1996); 0,50 (1997) dan 0,47 (1998). Di atas umur 10 tahun menghasilkan nilai rata-rata 0,53 (1996); 0,52 (1997) dan 0,49 (1998). Distribusi frekuensi berdasarkan umur perusahaan disajikan dalam Tabel 6.

Variabel independen keenam yang akan diuji adalah Status perusahaan yang dikelompokkan ke dalam perusahaan BUMN dan non BUMN. Seperti yang tersaji dalam Tabel 7 jumlah perusahaan BUMN sebesar 4 perusahaan (1996) dan 5 perusahaan masing-masing untuk tahun 1997,1998. Sedangkan jumlah perusahaan non BUMN sebesar 91 perusahaan (1996) dan 90 perusahaan masing-masing untuk tahun 1997,1998.

**TABEL 6**  
**DISTRIBUSI FREKUENSI BERDASARKAN UMUR PERUSAHAAN**

Umur (Tahun )	Tahun 1996				Tahun 1997				Tahun 1998			
	Jml	Min IP	Max IP	Rata-rata IP	Jml	Min IP	Max IP	Rata-rata IP	Jml	Min IP	Max IP	Rata-rata IP
0,00 - 3,00	30	0,26	0,70	0,50	23	0,33	0,81	0,51	19	0,33	0,65	0,47
3,01 - 5,00	17	0,26	0,67	0,48	21	0,35	0,74	0,51	23	0,28	0,74	0,55
5,01 - 10,00	37	0,26	0,65	0,49	44	0,23	0,72	0,50	45	0,28	0,67	0,47
≥ 10,01	11	0,35	0,65	0,53	7	0,44	0,60	0,52	8	0,42	0,60	0,49
Jumlah	95	0,26	0,70	0,50	95	0,23	0,81	0,50	95	0,28	0,74	0,49

Sumber: Indonesian Capital Market Directory 1997,1998,1999



**TABEL 7**  
**DISTRIBUSI FREKUENSI BERDASARKAN STATUS PERUSAHAAN**

Status	Tahun 1996				Tahun 1997				Tahun 1998			
	Jml	Min IP	Max IP	Rata-rata IP	Jml	Min IP	Max IP	Rata-rata IP	Jml	Min IP	Max IP	Rata-rata IP
BUMN	4	0,42	0,70	0,62	5	0,58	0,81	0,70	5	0,51	0,74	0,65
Non BUMN	91	0,26	0,67	0,49	90	0,23	0,74	0,49	90	0,28	0,70	0,48
Jumlah	95	0,26	0,70	0,50	95	0,23	0,81	0,50	95	0,28	0,74	0,49

\*) IP = Indeks Pengungkapan

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan 1996-1998

Variabel independen terakhir yang akan diuji adalah besarnya asset perusahaan. Perusahaan yang memiliki asset sampai dengan Rp.250 milyar menghasilkan nilai rata-rata indeks pengungkapan sebesar 0,47 (1996); 0,48 (1997) dan 0,40 (1998). Perusahaan berasset Rp.251 milyar – 500 milyar menghasilkan nilai rata-rata 0,46 (1996) dan 0,47 (1997, 1998). Perusahaan berasset Rp.501 milyar – 1000 milyar memberikan nilai rata-rata 0,52 (1996); 0,50 (1997) dan 0,46 (1998). Perusahaan berasset Rp.1001 milyar – 1500 milyar menghasilkan nilai rata-rata 0,50 (1996); 0,57 (1997) dan 0,49 (1998). Di atas Rp.1500 milyar menghasilkan nilai rata-rata indeks pengungkapan sebesar 0,56 (1996); 0,54 (1997) dan 0,57 (1998). Distribusi frekuensi berdasarkan jumlah asset perusahaan disajikan pada Tabel 8.

**TABEL 8**  
**DISTRIBUSI FREKUENSI BERDASARKAN JUMLAH ASSET**

Asset (Milyar )	Tahun 1996				Tahun 1997				Tahun 1998			
	Jml	Min IP *)	Max IP	Rata-rata IP	Jml	Min IP	Max IP	Rata-rata IP	Jml	Min IP	Max IP	Rata-rata IP
0 s/d 250	33	0,26	0,58	0,47	29	0,30	0,65	0,48	21	0,28	0,58	0,40
251 s/d 500	17	0,26	0,63	0,46	19	0,30	0,60	0,47	20	0,33	0,63	0,47
501 s/d 1000	20	0,26	0,67	0,52	11	0,33	0,63	0,50	9	0,35	0,67	0,46
1001 s/d 1500	6	0,44	0,60	0,50	10	0,37	0,81	0,57	10	0,40	0,60	0,49
≥ 1501	19	0,42	0,70	0,56	26	0,23	0,81	0,54	35	0,37	0,74	0,57
Jumlah	95	0,26	0,70	0,50	95	0,23	0,81	0,50	95	0,28	0,74	0,49

\*) IP = Indeks Pengungkapan

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan 1996-1998

Indek Pengungkapan sebagai variabel dependen dipergunakan sebagai pengukur luas pengungkapan sukarela ditentukan dari jumlah item informasi yang diberikan oleh perusahaan sampel dalam laporan tahunan dibagi dengan jumlah total item informasi yang dapat dicapai dalam setiap laporan tahunan. Misalnya jumlah item informasi dalam laporan tahunan sebesar 25 dibagi dengan jumlah total informasi yang dapat dicapai sebesar 43, maka besarnya indek pengungkapan adalah 0,58.

Sebagian besar item informasi yang banyak diberikan oleh manajemen perusahaan sampel antara lain:

- (1). Informasi mengenai produk jasa utama perusahaan
- (2). Statement/uraian strategi dan tujuan perusahaan
- (3). Uraian dampak strategi dimasa sekarang dan masa yang akan datang
- (4). Uraian kegiatan investasi yang telah dan akan dilakukan
- (5). Informasi pengurangan barang modal

Sedangkan item-item informasi yang jarang ( tidak ) diberikan oleh manajemen perusahaan sampel antara lain:

- (1) Informasi proyeksi aliran kas
- (2) Informasi elemen-elemen neraca dan laporan laba rugi yang diperbandingkan untuk 3 tahun atau lebih
- (3) Informasi pihak-pihak yang mencoba memperoleh pemilikan substansial terhadap saham perusahaan
- (4) Ringkasan statistik keuangan yang meliputi rasio rentabilitas, likuiditas, solvabilitas perusahaan untuk 6 tahun atau lebih
- (5) Uraian mengenai pembagian tanggung jawab fungsional dewan komisaris, direksi

### Uji Asumsi Klasik

Secara umum tidak ada masalah dengan hasil uji asumsi klasik sehingga model regresi layak untuk digunakan sebagai dasar menguji hipotesis penelitian. Satu-satunya masalah berkaitan dengan heteroskedastisitas yaitu pada tahun 1997. Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan *case wise diagnostic* dengan hasil menghapus variable prosentase kepemilikan publik (Tabel 9)

**TABEL 9**  
**HASIL UJI GLEJSER TAHUN 1997**

Nama Variabel	Signifikansi Tahun 1997
Rasio <i>Leverage</i>	0,066
Rasio Likuiditas	0,945
Reputasi KAP	0,228
Umur Perusahaan	0,270
Status Perusahaan	0,403
<i>Asset</i>	0,128

Sumber: data sekunder diolah



## Pengujian Hipotesis

Untuk membuktikan hipotesis pertama sampai dengan kedelapan dilakukan analisis regresi berganda variabel dependen dengan 7 variabel independen untuk data tahun 1996 dan 1998 dan dengan 6 variabel independen untuk tahun 1997. Hasil analisis regresi dapat dilihat pada Tabel 10, dan 11. Hasil perhitungan menunjukkan nilai F sebesar 3,005 dengan probabilitas 0,007 untuk tahun 1996, tahun 1997 nilai F sebesar 4,575 dengan probabilitas 0,000 dan tahun 1998 nilai F sebesar 12,300 dengan probabilitas 0,000 pada tingkat kepercayaan 0,05.

**TABEL 10**  
**HASIL UJI F TEST TAHUN 1996,1997, 1998**

Sumber: data sekunder diolah

	Tahun 1996	Tahun 1997	Tahun 1998
R Square	0,195	0,240	0,497
Adjusted R Square	0,130	0,187	0,457
F	3,005	4,575	12,300
Sig	0,007	0,000	0,000

**TABEL 11**  
**HASIL UJI T TEST TAHUN 1996,1997,1998**

Nama Variabel	Tahun 1996		Tahun 1997		Tahun 1998	
	t	Sig.	t	sig.	t	sig.
Rasio <i>Leverage</i>	-0,060	0,953	0,396	0,693	0,217	0,829
Rasio Likuiditas	-0,079	0,937	0,978	0,331	0,280	0,780
Persentase Publik	-0,521	0,604	-	-	-2,366	0,020
Reputasi KAP	1,946	0,055	0,007	0,994	-0,156	0,877
Umur Perusahaan	1,920	0,058	-1,534	0,129	-0,025	0,980
Status Perusahaan	2,197	0,031	2,857	0,005	2,444	0,017
<i>Asset</i>	2,376	0,020	2,775	0,007	7,323	0,000

Sumber: data sekunder diolah

Sedangkan untuk membuktikan hipotesis kesembilan digunakan hasil uji Sign test yang dapat dilihat pada Tabel 12

**TABEL 12**  
**HASIL UJI BEDA TINGKAT LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA**  
**TAHUN 1996 DENGAN TAHUN 1998**

Test Statistics <sup>a</sup>	
	SAAT - BELUM
Z	-.539
Asymp. Sig. (2-tailed)	.590

a. Sign Test

## Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini hipotesis alternatif pertama yang diajukan adalah rasio *leverage*, rasio likuiditas, persentase jumlah pemegang saham masyarakat (publik), reputasi kantor akuntan publik, umur perusahaan, status perusahaan dan besarnya *asset* perusahaan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan.

Hipotesis alternatif pertama yang diajukan tersebut didukung oleh data yaitu *sig. t* = 0,007 untuk tahun 1996, dan *sig. t* = 0,000 untuk tahun 1997 dan 1998. Dengan demikian rasio *leverage*, rasio likuiditas, persentase pemegang saham publik, reputasi kantor akuntan publik, umur perusahaan, status perusahaan dan besarnya *asset* perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan, kecuali tahun 1997 hanya meliputi rasio *leverage*, rasio likuiditas, reputasi kantor akuntan publik, umur perusahaan, status perusahaan dan besarnya *asset* perusahaan.

Hipotesis alternatif kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah rasio *leverage* berpengaruh secara positif terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Hipotesis alternatif kedua yang diajukan tersebut tidak didukung oleh data yaitu *sig. t* = 0,953 untuk tahun 1996 dan *sig. t* = 0,693 untuk tahun 1997 dan *sig. t* = 0,829 untuk tahun 1998. Dengan demikian hasil penelitian ini secara konsisten selama 3 tahun berturut-turut menunjukkan bahwa rasio *leverage* tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Hal itu mungkin disebabkan karena manajemen perusahaan di Indonesia menggunakan media (mekanisme) lain di luar pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan untuk menjelaskan perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) antara pemegang saham, kreditur dan manajer perusahaan. Hasil tersebut tidak berbeda dengan hasil penelitian Bambang Suropto (1998).

Hipotesis alternatif ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah rasio likuiditas berpengaruh secara positif terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Hipotesis alternatif ketiga di atas tidak didukung oleh data yaitu *sig. t* = 0,937 untuk tahun 1996 dan *sig. t* = 0,331 untuk tahun 1997 dan *sig. t* = 0,780 untuk tahun 1998. Dengan demikian hasil penelitian ini secara konsisten selama 3 tahun berturut-turut menunjukkan bahwa rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Hal itu mungkin juga disebabkan karena manajemen perusahaan di Indonesia menggunakan media (mekanisme) lain di luar pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan untuk menjelaskan perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) antara pemegang saham, kreditur dan manajer perusahaan. Hasil tersebut juga tidak berbeda dengan hasil penelitian Bambang Suropto (1998). Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Edi Subiyantoro (1996) disebabkan karena hasil penelitiannya lebih ditekankan pada pengungkapan wajib.

Hipotesis alternatif keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah persentase jumlah pemegang saham masyarakat (publik) berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Hipotesis alternatif keempat di atas untuk tahun 1996 tidak didukung oleh data yaitu *sig. t* = 0,604. Hasil tersebut tidak berbeda dengan hasil penelitian Djoko Susanto (1992), Ainun Naim dan Fu'ad Rakman (2000). Sedangkan untuk tahun 1998 didukung oleh data yaitu *sig. t* = 0,020 meskipun dengan arah negatif. Dengan demikian persentase pemegang saham publik dalam tahun 1998 berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Hasil tahun 1998 berbeda dengan hasil tahun 1996 kemungkinan karena ada peristiwa reformasi politik bulan Mei 1998 atau kemungkinan ada faktor-faktor lain yang berpengaruh tetapi belum dimasukkan dalam penelitian ini.

Hipotesis alternatif kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah reputasi kantor akuntan publik berpengaruh secara positif terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Hipotesis alternatif kelima untuk tahun 1996 didukung oleh data yaitu *sig. t* = 0,055 pada derajat kepercayaan 10



%. Sedangkan untuk tahun 1997 dan 1998 tidak didukung oleh data ( $\text{sig.}t = 0,994$ ) dan ( $\text{sig.}t = 0,877$ ). Hasil tahun 1997 dan 1998 tidak berbeda dengan hasil penelitian Djoko Susanto (1992). Perbedaan hasil penelitian tahun 1996 dengan 1997 dan 1998 mungkin karena dalam tahun 1996 proporsi penggunaan KAP reputasi dan KAP non reputasi oleh perusahaan sampel jumlahnya mendekati berimbang dibandingkan dengan tahun 1997 dan 1998.

Hipotesis alternatif keenam yang diajukan dalam penelitian ini adalah umur perusahaan berpengaruh secara positif terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Hipotesis alternatif keenam tersebut di atas untuk tahun 1996 didukung oleh data ( $\text{sig.}t = 0,058$ ) pada derajat kepercayaan 10 %. Dengan demikian dalam tahun 1996 semakin besar umur perusahaan semakin luas pengungkapan sukarela. Sedangkan dalam tahun 1997 tidak didukung oleh data ( $\text{sig.}t = 0,129$ ) dan ( $\text{sig.}t = 0,980$ ) untuk tahun 1998. Perbedaan hasil tahun 1996 dengan tahun 1997 dan 1998 mungkin disebabkan perbedaan jumlah perusahaan sampel yang berumur 10 tahun ke atas.

Hipotesis alternatif ketujuh yang diajukan dalam penelitian ini adalah status perusahaan berpengaruh secara positif terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Hipotesis alternatif ketujuh tersebut didukung oleh data ( $\text{sig.}t = 0,031$ ) untuk tahun 1996,  $\text{sig.}t = 0,005$  untuk tahun 1997 dan  $\text{sig.}t = 0,017$  untuk tahun 1998. Dengan demikian hasil penelitian selama 3 tahun berturut-turut secara konsisten menunjukkan bahwa status perusahaan BUMN berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dan lebih luas dalam memberikan pengungkapan secara sukarela dibandingkan dengan perusahaan non BUMN.

Hipotesis alternatif kedelapan yang diajukan dalam penelitian ini adalah besarnya asset perusahaan berpengaruh secara positif terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Hipotesis alternatif kedelapan tersebut didukung oleh data yaitu  $\text{sig.}t = 0,020$  untuk tahun 1996,  $\text{sig.}t = 0,007$  untuk tahun 1997 dan  $\text{sig.}t = 0,000$  untuk tahun 1998. Dengan demikian hasil penelitian selama 3 tahun berturut-turut secara konsisten menunjukkan bahwa semakin besar asset semakin luas perusahaan dalam memberikan pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini tidak berbeda dengan hasil penelitian Meek *et.al* (1995).

Hipotesis alternatif kesembilan yang diajukan dalam penelitian ini adalah tingkat luas pengungkapan sukarela sebelum dan pada saat krisis moneter berbeda. Hipotesis alternatif kesembilan tersebut tidak didukung oleh data yaitu  $\text{sig} = 0,59 > 0,05$ . Dengan demikian tingkat luas pengungkapan sukarela sebelum dan pada saat krisis moneter tidak berbeda. Hal ini mungkin terjadi karena masih banyak variabel independen lain yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.

## Kesimpulan

Dari uji hipotesis penelitian diperoleh temuan-temuan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian tahun 1996 dan 1998 menunjukkan bahwa rasio *leverage*, rasio likuiditas, persentase pemegang saham publik, reputasi kantor akuntan publik, umur perusahaan, status perusahaan dan besarnya asset perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan.
2. Hasil penelitian tahun 1997 menunjukkan bahwa rasio *leverage*, rasio likuiditas, reputasi kantor akuntan publik, umur perusahaan, status perusahaan dan besarnya asset perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan.

3. Hasil penelitian selama 3 tahun berturut-turut secara konsisten menunjukkan bahwa status perusahaan BUMN lebih luas dalam memberikan pengungkapan sukarela dibandingkan perusahaan non BUMN.
4. Hasil penelitian selama 3 tahun berturut-turut secara konsisten menunjukkan bahwa semakin besar *asset* perusahaan akan semakin luas dalam memberikan pengungkapan secara sukarela.
5. Hasil penelitian selama 3 tahun secara konsisten menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio *leverage* tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.
6. Hasil penelitian selama 3 tahun secara konsisten menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.
7. Hasil penelitian tahun 1996 menunjukkan bahwa semakin besar persentase pemegang saham publik tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela, sedangkan hasil penelitian tahun 1998 menunjukkan bahwa persentase pemegang saham publik berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dengan arah negatif.
8. Hasil penelitian tahun 1996 pada *significance level* 10 % menunjukkan reputasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Untuk tahun 1997 dan 1998 secara konsisten reputasi kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Hasil penelitian tahun 1997 dan 1998 tidak berbeda dengan hasil penelitian Djoko Susanto (1992). Perbedaan hasil penelitian tahun 1996 dengan tahun 1997 dan 1998 mungkin dipengaruhi oleh terlalu sederhana dalam pengelompokan reputasi 3 besar dan non reputasi. Selain itu mungkin juga dipengaruhi proporsi penggunaan KAP bereputasi dan non reputasi dalam tahun 1996 mendekati keseimbangan dibandingkan dengan tahun 1997 dan 1998.
9. Hasil penelitian tahun 1996 pada *significance level* 10 % menunjukkan bahwa semakin besar umur perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Sedangkan pada tahun 1997 dan 1998 tidak berpengaruh. Hal ini mungkin karena jumlah sampel perusahaan yang berumur 10 tahun ke atas pada tahun 1996 lebih banyak dibandingkan jumlah sampel tahun 1997 dan 1998.
10. Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat luas pengungkapan sukarela sebelum krisis moneter (tahun 1996) tidak berbeda dengan pada saat krisis moneter (tahun 1998). Hal ini mungkin terjadi karena masih banyak variabel independen lain yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Hal itu dapat dilihat dari masih rendahnya *adjusted R Square* pada tahun 1996 sebesar 0,130, tahun 1997 sebesar 0,187 dan tahun 1998 sebesar 0,457.

### Keterbatasan Penelitian

Indek Pengungkapan sebagai pengukur luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan didasarkan pada interpretasi peneliti setelah membaca isi laporan tahunan. Dengan demikian ada unsur subjektivitas peneliti dalam memahami isi laporan tahunan.

Salah satu variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini adalah reputasi kantor akuntan publik. Variabel tersebut diperlakukan sebagai *dummy* yang dikelompokkan ke dalam KAP bereputasi (3 besar) dan KAP non bereputasi. Pengelompokan reputasi tersebut mengandung kelemahan karena terlalu sedikit. Dalam kenyataannya ada KAP yang tidak masuk kelompok bereputasi tetapi berafiliasi dengan KAP asing yang sangat disegani di Amerika Serikat.



Item informasi sukarela yang terdapat pada Lampiran 1 disesuaikan dengan periode penelitian. Saat ini ada item pengungkapan sukarela yang telah dijadikan pengungkapan wajib antara lain rencana kegiatan investasi yang telah dan atau akan dilaksanakan.

## Saran

Dalam penelitian ini, hasil analisis regresi menghasilkan  $R^2$  yang cukup rendah tahun 1996 sebesar 0,195 dan tahun 1997 sebesar 0,240, sedangkan tahun 1998 sebesar 0,497. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian berikutnya sangat perlu dipertimbangkan memasukkan variabel-variabel baru yang lebih sesuai (lebih *matching*) antara variabel independen dengan item informasi pengungkapan sukarela. Variabel tersebut antara lain *insider ownership*, *institutional ownership*, dewan komisaris, dan komite audit.

## REFERENSI

- Ahmed K. and D. Nicholas. 1994. "The Impact of Non Financial Company Characteristic on Mandatory Disclosure Compliance in Developing Countries the Case of Bangladesh". *International Journal of Accounting Education and Research*. pp 62-77.
- Ainun Na'im dan Fu'ad Rakhman, 2000. "Analisis Hubungan Antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Dengan Struktur Modal Dan Tipe Kepemilikan Perusahaan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol. 15.No. 1.
- Bambang Surtpto. 1998. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada (tidak dipublikasikan).
- Botosan, Christine A. 1997. "Disclosure Level and the Cost of Equity Capital". *The Accounting Review*. Vol. 72.No. 1pp.323-349.
- Buzby, Stephen L. 1975. "Company Size, Listed Versus Unlisted Stocks and the Extent of Financial Disclosure", *Journal of Accounting Research*. Spring. pp. 16-37.
- Chow, Chao W., and Adrian Wong Boron. 1987. "Voluntary Financial Disclosure by Mexican Corporation". *Accounting Review*. pp. 533-541.
- Cooke, T.E., 1989. "Disclosure in the Corporate Annual Reports of Swedish Companies". Spring. Vol. 19.pp. 113-124.
- Cooke, T.E. 1992. "The Impact of Size, Stock Market Listing and Industry Type on Disclosure in the Annual Reports of Japanese Listed Corporations". *Accounting and Business Research*. pp.229-237.
- Cooke, T.E.1993. "Disclosure in Japanese Corporate Annual Reports". *Journal of Business Finance & Accounting*. Vol.20. Juni.pp. 521-535.
- Daljono.2000. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Initial Return Saham Yang Listing Di BEJ Tahun 1990-1997". *Makalah Dipresentasikan Pada Simposium Nasional Akuntansi N*.
- Djoko Susanto, 1992, "An Empirical Investigation of the Extent of Corporate Disclosure in Annual Reports Companies Listed on the Jakarta Stock Exchanges", *Unpublished PhD Dissertation*, University of Arkansas, USA, 1992

- Dye, Ronald A. and Sri S. Sridhar. 1995. "Industry Wide Disclosure Dynamics". *Journal of Accounting Research*. Vol 33, pp 57-174
- Eccles, Robert G and Mavrinac, Sarah C. 1995. "Improving the Corporate Disclosure Process". *Sloan Management Review*. Vol.36, No.4, pp. 11-25.
- Edi Subiyantoro. 1996. *Hubungan Antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Karakteristik Perusahaan Publik di Indonesia*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada (tidak dipublikasikan).
- Elliott, Robert K and Jacobson Peter D. 1994. "Cost and Benefits of Business Information Disclosure", *Accounting Horizons*. Vol., 8, No. 4, December, pp. 80-96
- FASB, 1978. *Objective of Financial Reporting by Business Enterprises, Statements of Financial Accounting Concept No. 1*, Stamford, Connecticut.
- FASB, 1986. *Recognition and Measurement In Financial Statements of Business Enterprises, Statement Of Financial Accounting Concept No. 5*.
- Fitriani, 2001, "Signifikansi Perbedaan Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Wajib dan Sukarela pada Laporan Keuangan Perusahaan Public yang Terdaftar di BEJ", paper dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi IV, pp 133 – 154
- Holland, John- 1998. "Private Voluntary Disclosure, Financial Intermediation and Market Efficiency". *Journal of Business Finance and Accounting*, January/March, pp. 29-65.
- King, Ronald R and Wallin, David E. 1991. "Voluntary Disclosures When Seller's Level of Information is Unknown". *Journal of Accounting Research*, Vol. 29. No. 1, Spring.
- Lang, Mark and Russel Lundholm. 1993. "Cross-Sectional Determinants of Analyst Ratings of Corporate Disclosure". *Journal Accounting Review*. pp 246-271
- Lang, Mark and Russel Lundholm. 1996. "Corporate Disclosure Policy and Analyst Behavior". *Journal Accounting Review*. pp 467- 492
- Marwata, 2001, "Hubungan Antara karakteritik Perusahaan dan Kualitas Ungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia", paper dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi IV, pp 155 – 173
- Meek, Gary K., Clare B. Roberts and Gray S.J. 1989. "Globalization of stock Markets and Foreign Listing requirements: Voluntary Disclosure by Continental European Companies Listed on The Stock Exchange". *Journal of International Business Studies*. Vol.20, pp. 315-336.
- Meek, Gary K., Clare B. Roberts and Sidney J. Gray. 1995. "Factors Influencing Voluntary Annual Report Disclosure by U.S, U.K and Continental European Multinational Corporation". *Journal of International Business Studies*. Vol.26, pp. 555-572.
- Robins, W.A. and K.R. Austin. 1986. "Disclosure Quality in Governmental Financial Reports". *Journal of Accounting Research*. Vol 24, pp. 412-421.
- Schipper, Katherine. 1981. "Discussion of Voluntary Corporate Disclosure: The Case of Interim Reporting". *Journal of Accounting Research*. Vol. 19, pp. 85-89.
- Singhvi, Surendra S. and Harsha B. Desai. 1971. "An Empirical Analysis of the Quality of Corporate Financial Disclosure". *The Accounting Review*. Januari, pp. 129-138.
- Rina Trisnawati. 1999. "Pengaruh Informasi Prospektus Pada Return Saham di Pasar Modal". *Makalah dipresentasikan Pada Simposium Nasional Akuntansi II*



- Tong Tan Liong, Kidam Zainal Abidin, Wah Choong Pooi. 1990. "Information Needs Of Users And Voluntary Disclosure", *The Malaysian Accountant April*.
- Verrecchia, R.E. 1990. "Discretionary Disclosure", *Journal of Accounting and Economics*, Vol 5, pp. 179-194.
- Wallace, R., Kamal Naser and Arceli Nora. 1994. "The Relationship between The Comprehensiveness of Corporate Annual Reports and Firm Characteristic in Spain", *Accounting and Business Research*, Vol. 25, Winter, pp. 41-53.
- Yuniati Gunawan. 2000. "Analisis Pengungkapan Informasi Laporan Tahunan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta". Makalah dipresentasikan Pada Simposium Nasional Akuntansi III.
- Zarzeski, MP. 1996. "Spontaneous Harmonization Effects Of Culture And Market Force On Accounting Disclosure Practise". *Accounting Horizon*, Vol. 10, No. 1, March, pp. 18-37.